

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu lingkungan semakin menjadi agenda sentral dalam politik internasional sejak awal abad ke-21. Di dalam kajian ilmu Hubungan Internasional, hampir semua ilmuwan sepakat menjadikan masalah ancaman lingkungan sebagai masalah yang paling mendesak untuk ditangani melalui pendekatan-pendekatan secara global.¹ Permasalahan lingkungan yang menjadi isu bersama global salah satunya adalah isu perubahan iklim yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil dan pelepasan gas berbahaya oleh industri di berbagai negara. Perubahan iklim ini memiliki dampak yang berbahaya terhadap manusia dan juga lingkungan seperti tingkat curah hujan yang tidak normal, meningkatnya risiko banjir, kontaminasi persediaan air tawar di pesisir dan naiknya permukaan air laut.²

Australia merupakan salah satu negara yang ikut merasakan dampak dari perubahan iklim. Adapun dampak perubahan iklim paling buruk yang terjadi di Australia yaitu kebakaran hutan di negara bagian New South Wales, banjir, pemutihan massal *great barrier reef* (sistem terumbu karang terbesar di dunia), siklon, dan gelombang panas.³ Sejak Scott Morrison terpilih menjadi Perdana Menteri Australia pada tahun 2018, tidak banyak upaya yang dilakukan untuk menciptakan langkah-langkah proaktif dalam melawan dampak perubahan iklim. Scott Morrison

¹ Umay Suryadi Bakry, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional* (Kencana, 2017): 278-279.

² Umay Suryadi Bakry, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*:281-282.

³ Joshua Mcdonald, "Morrison Failed Australians on Climate. Will It Cost Him the Next Election?," *The Diplomat*, April 1, 2022, diakses April 10, 2022, <https://thediplomat.com/2022/04/morrison-failed-australians-on-climate-will-it-cost-him-the-next-election/>.

memimpin partai liberal konservatif, yang secara praktis tidak fokus pada kebijakan lingkungan yang proaktif.⁴ Morrison selalu menolak akan adanya kebijakan iklim yang lebih baik, karena Morrison percaya bahwa Australia telah “bertanggung jawab”, dan percaya bahwa pemanasan iklim pada dasarnya adalah kebiasaan baru yang harus diadopsi.⁵

Meskipun telah merasakan dampak nyata dari perubahan iklim, pemerintah Scott Morrison tetap membuat kebijakan kontradiktif yang mana lebih banyak membuka proyek batu bara dan gas.⁶ Selain itu, Morrison juga menarik dukungan Australia untuk UNFCCC *Green Climate Fund*, yang merupakan instrumen pendanaan iklim multilateral. Pada stasiun radio The Alan Jones Breakfast Show (2gb) ia menyatakan bahwa: *“Nor are we bound to go and tip money into that big climate fund; we’re not going to do that either,” he said. “So I’m not going to spend money on global climate conferences and all that sort of nonsense”*.⁷ Morrison mengatakan kebijakan seperti itu tidak diperlukan, karena Australia dapat memenuhi janjinya di bawah Perjanjian Paris “dengan mudah”, tanpa menjatuhkan ekonomi di dalam negeri dan tidak menghabiskan uang hanya untuk “dana iklim global”. Berbeda dengan pemerintahan perdana menteri sebelumnya, saat Australia dipimpin

⁴ Scott Wilson, “In Australia, Fires Energize Environmental Movement,” *The Washington Post*, January 18, 2020, diakses April 2, 2022, <https://www.washingtonpost.com/national/in-australia-fires-heat-up-the-environmental-movement/>.

⁵ Sarah Martin, “Australia Already ‘Carrying Its Load’ on Emissions dan Must Adapt to Warmer Climate, PM Says”, *The Guardian*, January 29, 2020, diakses April 2, 2022, <https://www.theguardian.com/environment/australia-already-carrying-its-load-on-emissions-and-must-adapt-to-warmer-climate-pm-says>.

⁶ Joshua Mcdonald, “Morrison Failed Australians on Climate. Will It Cost Him the Next Election?”

⁷ Scott Morrison, “‘Prime Minister Scott Morrison’, The Alan Jones Breakfast Show, 2GB Radio;” n.d., diakses Juni 08, 2022, <https://www.2gb.com/its-not-as-though-theyre-painting-it-on-there-pm-supports-opera-house-promotion/>.

oleh Malcolm Turnbull, Australia aktif menjadi negara pendonor dana iklim global, bahkan ia menghabiskan US\$1 miliar selama lima tahun yang disumbangkan ke *Green Climate Fund* untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui serangkaian mekanisme multilateral dan bilateral.⁸

Meskipun Australia di bawah kepemimpinan Scott Morrison belum memperlihatkan komitmen dalam menurunkan emisi serta mundur sebagai pendonor dana iklim global, namun Australia masih tetap menyediakan bantuan dalam pendanaan iklim yang disalurkan ke Kawasan Pasifik Selatan. Letak geografis kawasan pasifik yang dikelilingi oleh perairan luas, menyebabkan kawasan ini lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim, terutama dengan kenaikan permukaan laut. Perubahan iklim yang berkontribusi pada kenaikan permukaan laut tersebut, menjadi masalah nyata yang dihadapi negara di Pasifik Selatan pada saat ini, bahkan menjadi keamanan nasional utama mereka.⁹ Negara di Pasifik Selatan sebagian besarnya merupakan negara berkembang yang kawasannya terdiri dari gugusan atol, selain hanya menyediakan sedikit ruang untuk bisa ditinggali, wilayahnya juga memiliki ketinggian yang terbatas.¹⁰ Sebelum isu perubahan iklim yang kini mengancam eksistensinya, negara di kawasan Pasifik Selatan juga telah kesulitan menghadapi masalah keamanan nasionalnya.

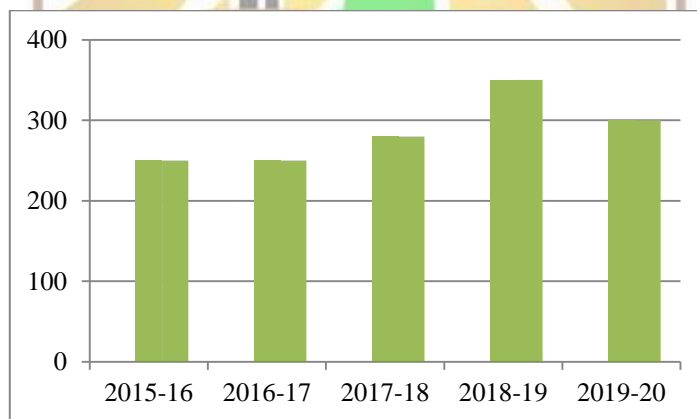
⁸ Robin Davies, "Climate Finance: The Paris Opera, and Australia's (Un)Supporting Role," *Devpolicy*, diakses Juni 11, 2022, <https://devpolicy.org/Climate-finance-the-Paris-opera-and-Australias-unsupporting-role-20151202/>.

⁹ Ella L. Howes, Silvana Birchenough, and Susana Lincoln, "Impacts of Climate Change Relevant to the Pacific Islands," *Pacific Marine Climate Change Report Card: Science Review* (2018): 1–19, <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/12-1.5-degree-temperature-rise.pdf>.

¹⁰ Muhammad Riza Hanafi, "Majuro Declaration : 'Kudeta' Kepemimpinan Isu Perubahan Iklim," *Jurnal Transformasi Global* vol.3, no 1. (2016).

Berbanding terbalik dengan sikapnya yang skeptis dengan isu perubahan iklim, Australia di bawah pemerintahan Scott Morrison justru menjadi salah satu negara yang tanggap terhadap bencana dan terus membantu Pasifik Selatan dalam menangani dampak perubahan iklim. *Australian Agency for International Development Cooperation*, atau juga dikenal sebagai Australian Aid, menjadi lembaga yang menyalurkan bantuan Australia yang dibiayai oleh Pemerintah Australia melalui Pemerintah Federal.¹¹ Bantuan luar negeri dapat didefinisikan sebagai uang atau dukungan yang diberikan oleh individu atau pemerintah guna membantu negara-negara miskin melalui program jangka panjang dengan tujuan untuk mengakhiri kemiskinan atau bencana kemanusiaan.¹²

**Grafik 1.1 Total Bantuan Luar Negeri Australia dalam Aksi Iklim
(AU\$ Million)**



Sumber: Australian Government, DFAT¹³

¹¹ Richard Curtain and Matthew Dornan, "Climate Change and Migration in Kiribati, Tuvalu and Nauru-Devpolicy Blog from the Development Policy Centre," *Anu* (2019): 1–7, <https://devpolicy.org/climate-change-migration-kiribati-tuvalu-nauru-20190215/>.

¹² Joshua McDonald, "Morrison Failed Australians on Climate. Will It Cost Him the Next Election?"

¹³ Australian Government, "Climate Change," *Department of Foreign Affairs and Trade*, 2021, diakses April 10, 2022, <https://www.dfat.gov.au/international-relations/themes/climate-change>.

Berdasarkan grafik 1.1, total bantuan luar negeri Australia dalam pembangunan iklim mencapai AU\$1,4 miliar dari 2015-2020, dan pada tahun 2018-2019 merupakan total terbanyak bantuan Australia untuk aksi perubahan iklim.¹⁴ Peningkatan jumlah bantuan iklim tersebut merupakan awal Scott Morrison menjabat sebagai Perdana Menteri Australia. Dalam konteks ini, pada COP26, Scott Morrison juga menambahkan bantuan sebesar AU\$500 juta untuk tahun 2020-2025 guna membangun ketahanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim. Ini merupakan peningkatan dari janji Australia sebelumnya kepada Pasifik Selatan untuk menghabiskan AU\$300 juta selama empat tahun (2016-2020).¹⁵

Jika dikaitkan dengan kebijakan Scott Morrison yang tidak fokus pada lingkungan hingga menarik Australia sebagai pendonor dana iklim global karena tidak mau menghabiskan uang, tetapi di sisi lain, Scott Morrison justru meningkatkan bantuan iklim Australia ke negara-negara di Pasifik Selatan. Dari kebijakan tersebut, peneliti menilai bahwa Australia memiliki kepentingan dibalik bantuan iklim yang diberikan kepada Pasifik Selatan, karena bantuan luar negeri tidak dapat dipisahkan dari kepentingan politik internasional negara donor, seperti dalam aspek pertahanan, pengaruh politik, dan lain-lain. Bantuan luar negeri Australia juga merupakan hasil dari kebijakan yang ditentukan melalui proses politik dalam negerinya. Hal ini kemudian menarik peneliti untuk mengetahui apa motif Australia dalam memberikan bantuan iklimnya ke Pasifik Selatan pada masa pemerintahan Scott Morrison.

¹⁴ Australian Government, "Climate Change."

¹⁵ Australian Government, "Australia Pacific Climate Change Action Program Design Document," , *Department of Foreign Affairs and Trade*, 2018, diakses April 10, 2022 <https://apclimatepartnership.com.au/Posters.html>.

1.2 Rumusan Masalah

Pada masa pemerintahan Scott Morrison, Australia memiliki komitmen yang rendah terhadap perubahan iklim dan belum mengambil langkah yang tepat untuk mencapai target iklim. Selain itu, Australia masih teguh mempertahankan industri batu bara dan gasnya yang menghasilkan emisi tinggi dan sangat tidak ramah lingkungan. Meskipun Australia belum memperlihatkan komitmennya dalam melakukan pembaruan terkait target pengurangan emisi dan kebijakannya untuk mundur sebagai pendonor dana iklim global, di lain sisi, Morrison justru meningkatkan bantuannya ke Pasifik Selatan dengan mengumumkan peningkatan jumlah bantuan sebanyak AU\$500 juta untuk tahun 2020 dan 2025. Dibalik bantuan luar negeri tersebut Australia tentu saja memiliki motif, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang motif Australia dalam memberikan bantuan kepada Pasifik Selatan dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang ingin dijawab oleh peneliti adalah “Apa motif Australia dalam memberikan bantuan iklim ke Pasifik Selatan pada masa pemerintahan Scott Morrison?”.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis motif Australia di bawah pemerintahan Perdana Menteri Scott Morrison dalam memberikan bantuan terkait isu perubahan iklim ke Pasifik Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini , berdasarkan judul yang ingin dibahas , diharapkan memberi manfaat di antaranya :

1. Secara akademis, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan akademis dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional dan sebagai bahan referensi bagi penstudi lainnya yang ingin meneliti khususnya mengenai motif dalam pemberian bantuan luar negeri.
2. Secara praktis, diharapkan mampu berkontribusi pada pusat pengkajian dan pengembangan kebijakan kawasan Asia Pasifik dan Afrika (P3K2 Aspasaf) pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

1.6 Studi Pustaka

Dalam menjawab penelitian mengenai motif bantuan Australia dalam isu perubahan iklim di Pasifik Selatan pada masa pemerintahan Scott Morrison, peneliti menemukan beberapa referensi yang relevan untuk dijadikan acuan dalam melihat permasalahan yang diangkat. Studi pustaka yang dilakukan bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun beberapa referensi yang dijadikan sebagai acuan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tinjauan pustaka pertama adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Yusuf Rifaldy pada tahun 2020 yang berjudul “Melihat Latar Belakang Australia dalam Memberikan Bantuan Luar Negeri ke Kawasan Pasifik”.¹⁶ Topik yang dibahas dalam

¹⁶ Yusuf Rifaldy, “Melihat Latar Belakang Australia Dalam Memberikan Bantuan Luar Negeri Ke Kawasan Pasifik,” *Jurnal Hubungan Internasional* vol.13, no. 2 (2020): 185.

artikel tersebut mengenai Australia yang telah sejak lama memberikan bantuan luar negerinya ke Kawasan Pasifik. Lokasi geografis yang berdekatan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Australia memberikan bantuan luar negerinya ke kawasan tersebut. Adapun jenis bantuan yang diberikan Australia ke Kawasan Pasifik meliputi dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan, keamanan dan pertahanan, serta manajemen terhadap perekonomian. Dalam penelitiannya, Yusuf Rifaldy menjelaskan bahwa dibalik pemberian bantuan luar negeri Australia ke negara-negara di Kawasan Pasifik, terdapat motif ekonomi dan keamanan. Di bidang ekonomi, Australia memiliki kepentingan untuk memperluas pasar dan perekonomian dikarenakan Kawasan Pasifik belum mendapat akses yang luas ke perdagangan internasional. Selain itu, pemberian bantuan ini juga melihat bahwasanya keamanan suatu negara dapat dipengaruhi oleh keamanan dari negara lain. Sebagai wilayah yang memiliki posisi dan letak geografis yang berdekatan dengan Australia, keamanan di wilayah Pasifik menjadi penting bagi keamanan nasional Australia.

Artikel jurnal tersebut membantu peneliti dalam memberikan informasi dan penjelasan terkait kepentingan Australia dibalik bantuan luar negerinya, terutama dari motif ekonomi dan keamanan. Adapun perbedaan dari artikel jurnal tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang hanya membahas bantuan luar negeri Australia secara umum dan menjelaskan dasar dari dilaksanakannya bantuan luar negeri tersebut. Sementara itu, peneliti lebih berfokus pada motif bantuan iklim Australia di Pasifik Selatan pada masa pemerintahan Scott Morrison.

Pada tinjauan pustaka kedua, peneliti merujuk sebuah artikel jurnal yang ditulis oleh Farah Diba Hallatu dan Irma Indrayani dengan judul “*Australian Foreign Aid Motivation For Tuvalu In Efforts To Cope With Climate Change 2015–2020*”.¹⁷ Penelitian ini membahas terkait bantuan Australia ke Tuvalu sebagai salah satu negara yang berada di Pasifik Selatan. Kondisi Tuvalu saat ini sedang menghadapi masalah perubahan iklim. Sehingga Australia berkomitmen untuk bekerja dalam kemitraan dengan Pemerintah Tuvalu untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi rakyatnya guna membangun ketahanan terhadap dampak buruk perubahan iklim dan bencana alam. Artikel ini melihat bahwa bantuan luar negeri yang diberikan Australia kepada Tuvalu tidak hanya untuk mengatasi dampak perubahan iklim, namun ada tujuan lain dalam pemberian bantuan ini yaitu sebagai salah satu strategi *soft power* Australia untuk mempertahankan dominasi dan pengaruhnya di kawasan Pasifik.

Artikel jurnal tersebut sangat berkontribusi dalam penelitian ini karena memberikan penjelasan terkait tujuan Australia dalam memberikan bantuan luar negerinya yaitu untuk memperkuat identitas Australia di Kawasan Pasifik dan bantuan yang diberikan juga dapat menambah citra baik Australia. Sementara itu perbedaan penelitian dengan artikel jurnal ini adalah terletak pada objek penelitian, pembahasan artikel jurnal ini hanya berfokus pada bantuan luar negeri Australia untuk mengatasi perubahan iklim di Tuvalu, sementara itu peneliti akan menganalisis bantuan iklim Australia khususnya pada masa pemerintahan Scott Morrison ke negara-negara di Kawasan Pasifik secara regional.

¹⁷ Farah Diba Hallatu and Irma Indrayani, “Australian Foreign Aid Motivation For Tuvalu In Efforts To Cope With Climate Change 2015 - 2020,” *Journal of Social Political Sciences* vol.3, no. 1 (2022): 1–17.

Tinjauan pustaka ketiga merupakan *Australian Defence Force Journal* yang ditulis oleh Peter Brown dengan judul “*Australian Influence in the South Pacific*”.¹⁸ Hasil penelitian ini menjelaskan Pasifik Selatan yang dilihat oleh Australia sebagai bagian dari lingkup pengaruh alaminya. Australia telah sejak lama memiliki kepentingan strategis di Pasifik Selatan dan berusaha mempengaruhi negara-negara kepulauan Pasifik melalui berbagai upaya seperti intervensi hingga hubungan bilateral melalui bantuan dan perdagangan. Pasifik Selatan memiliki peranan penting dalam kebijakan keamanan Australia, sehingga kestabilan lingkungan di kawasan ini menjadi kepentingan strategis bagi Australia. Dalam mendukung tujuan tersebut, kebijakan Pemerintah Australia untuk Kawasan Pasifik lebih terarah pada aspek keamanan, pembangunan ekonomi dan pemberian bantuan luar negeri.

Kontribusi artikel jurnal tersebut terhadap penelitian ini adalah untuk mengetahui apa kepentingan Australia di kawasan Pasifik Selatan serta memahami apa yang memotivasi Australia dalam mengeluarkan kebijakan khususnya untuk negara-negara di Kawasan Pasifik, baik melalui hubungan bilateral, perdagangan dan pemberian bantuan maupun melalui intervensi. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut membahas pengaruh Australia yang dilakukan melalui berbagai kebijakan luar negeri, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada motif Australia melalui bantuan luar negerinya pada masa pemerintahan Scott Morrison ke negara-negara di Pasifik Selatan.

¹⁸ Peter Brown, “Australian Influence in the South Pacific,” *Australian Defence Force Journal* (2012): 66–78.

Tinjauan pustaka keempat adalah artikel jurnal yang berjudul “*Australia Middle Approach Towards Climate Change in Pacific Island*” yang ditulis oleh Siti Dinda Narisya.¹⁹ Penelitian ini menjelaskan pendekatan Australia dalam menangani isu perubahan iklim di kawasan Pasifik Selatan dengan status *middle power* nya di dunia serta agen dominan di kawasan tersebut. Dalam isu perubahan iklim, Australia menerapkan identitasnya sebagai *middle power* dengan mengeluarkan beberapa tindakan yang akan melindungi dan menciptakan keamanan di kawasan Pasifik Selatan. Secara umum, tindakan tersebut dilakukan dengan cara unilateral hingga multilateral yang sesuai dan bermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan status *middle powernya*, Australia telah menjadi mitra utama di Pasifik dalam masalah iklim, selain multilateralisme sebagai perwujudan *middle power diplomacy*, Australia juga terus mengalokasikan dana untuk Pasifik Selatan. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa program yang diberikan Australia dalam kerangka pemerintahannya yang disebut *Pacific Regional Program*.

Kontribusi artikel jurnal ini dengan penelitian adalah memberikan penjelasan tentang bagaimana peranan Australia sebagai entitas besar di kawasan dalam memberi bantuan iklim ke wilayah Pasifik Selatan dengan status kekuatan Australia sebagai *middle power country*. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian, artikel tersebut menjelaskan mengenai upaya Australia dalam forum internasional dalam isu perubahan iklim, sementara peneliti ingin menganalisis motif bantuan luar negeri Australia di bawah pemerintahan Perdana Menteri Scott Morrison.

¹⁹ Siti Dinda Narisya, “Australia’s Middle Power Approach Towards Climate Change in Pacific Island,” *Jurnal Transformasi Global* vol.8, no. 1 (2021): 1–12.

Tinjauan pustaka kelima, berjudul “Bantuan Australia kepada Kiribati melalui Program *Kiribati Australia Nursing Initiative* (KANI)” yang ditulis oleh Dewi Nawar Sri Juita dan Baiq L.S.W. Wardhani.²⁰ Artikel jurnal tersebut menjelaskan kebijakan *Migration with Dignity* sebagai salah satu upaya dan harapan dari pemerintah Kiribati dalam menanggapi masalah perubahan iklim yang dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakatnya. Australia berupaya mendukung kebijakan tersebut dengan meningkatkan keterampilan, kemampuan, dan pendidikan masyarakat dengan pemberian beasiswa yang dikenal dengan *Kiribati Australia Nursing Initiative* (KANI). Melalui KANI, Australia mempermudah para siswa yang telah menyelesaikan program keperawatan di Griffith University untuk mendapatkan pekerjaan di Australia dengan menawarkan gaji yang lebih daripada bekerja di Kiribati.

Menurut Dewi N.S.J dan Baiq L.S.W. dalam penelitiannya ditemukan motif dan kepentingan Australia dibalik bantuan program KANI yang diberikan kepada Kiribati. Adapun dalam motif kemanusiaan Australia melalui bantuan KANI adalah mengurangi masalah pengangguran di Kiribati. Melalui KANI, secara tidak langsung Australia telah menyelesaikan masalah domestik, seperti tingginya permintaan terhadap tenaga kerja terampil di sejumlah sektor yang bahkan tidak mampu dipenuhi oleh pasar tenaga kerja internasional. Selanjutnya, dalam motif politik menurutnya Australia sangat diuntungkan dengan adanya program KANI, karena Australia sedang kesulitan dalam merekrut perawat berpengalaman, sehingga melalui KANI, Australia

²⁰ Dewi Nawar Sri Juita and Baiq L. S. W. Wardhani, “Bantuan Australia Kepada Kiribati Melalui Program Kiribati Australia Nursing Initiative (KANI),” *Insignia: Journal of International Relations* vol.8, no. 1 (2021): 1.

dapat memenuhi kebutuhan perawat di negaranya. Sedangkan dalam citra negara, ini akan membentuk citra Australia di dunia internasional sebagai negara yang peduli terhadap dampak buruk perubahan iklim.

Artikel jurnal ini membantu peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai salah satu program bantuan Australia untuk negara di Kawasan Pasifik, di mana bantuan yang diberikan oleh negara donor tidak sepenuhnya didasari oleh keinginan sukarela dalam membantu masalah domestik di negara penerima. Negara pendonor akan memiliki kepentingan ketika memutuskan kebijakan dalam memberikan bantuan. Kemudian, peneliti juga dapat mengetahui bagaimana permasalahan nasional yang dihadapi oleh Kiribati dan juga masalah nasional Australia sehingga membantu Kiribati melalui program KANI. Sedangkan perbedaan artikel jurnal ini terletak pada konsep yang digunakan, artikel jurnal tersebut menggunakan konsep kepentingan sementara peneliti menggunakan konsep motif bantuan luar negeri yang membantu untuk menganalisis motif dibalik bantuan luar negeri Australia dari bidang kemanusiaan, politik, ekonomi dan juga lingkungan.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Motif Bantuan Luar Negeri

Menurut KJ Holsti dalam bukunya *“International Politics: Framework of Analysis”*, bantuan luar negeri merupakan transfer uang, barang, teknologi atau bantuan teknis dari negara donor ke negara penerima bantuan yang menjadi instrumen dari sebuah kebijakan yang digunakan oleh banyak negara dalam

melakukan hubungan luar negeri.²¹ Pada proses pelaksanaannya, sebagian besar bantuan luar negeri dapat diberikan secara bilateral, yaitu langsung dari satu negara ke negara lain, melalui bantuan bilateral ini negara pendonor dapat memiliki akses kontrol yang luas terhadap pemberian bantuan. Selain itu negara juga dapat memberikan bantuan luar negeri secara tidak langsung melalui bantuan multilateral, yang sumber dayanya berasal dari beberapa donor.²²

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan konsep motif bantuan luar negeri untuk menganalisis motif bantuan Australia terkait isu perubahan iklim di Pasifik Selatan pada masa pemerintahan Scott Morrison. John Degnbol-Martinussen dan Poul Engberg-Pedersen dalam bukunya yang berjudul “*Aid: Understanding International Development Cooperation*” berpendapat bahwa bantuan luar negeri merupakan salah satu bentuk kerja sama pembangunan internasional dengan berbagai aktor yang masing-masing memiliki motif, kepentingan, tujuan dan strategi yang digunakan dalam pemberiannya.²³ Motif bantuan luar negeri menjadi pendorong bagi negara dalam memberikan bantuan luar negerinya kepada negara lain, dan juga memperlihatkan tujuan dari negara donor dalam memberikan bantuan tersebut kepada negara penerima.²⁴ Dibalik bantuan luar negeri yang diberikan negara pendonor terdapat latar belakang yang berbeda dan motif tersendiri. Hal tersebut yang

²¹ K.J. Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis: Englewood Cliffs, 2nd Edition* (Saint Paul: Prentice Hall, 1972).

²² Carol Lancaster, *Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics* (Chicago: The University of Chicago Press, 2007).

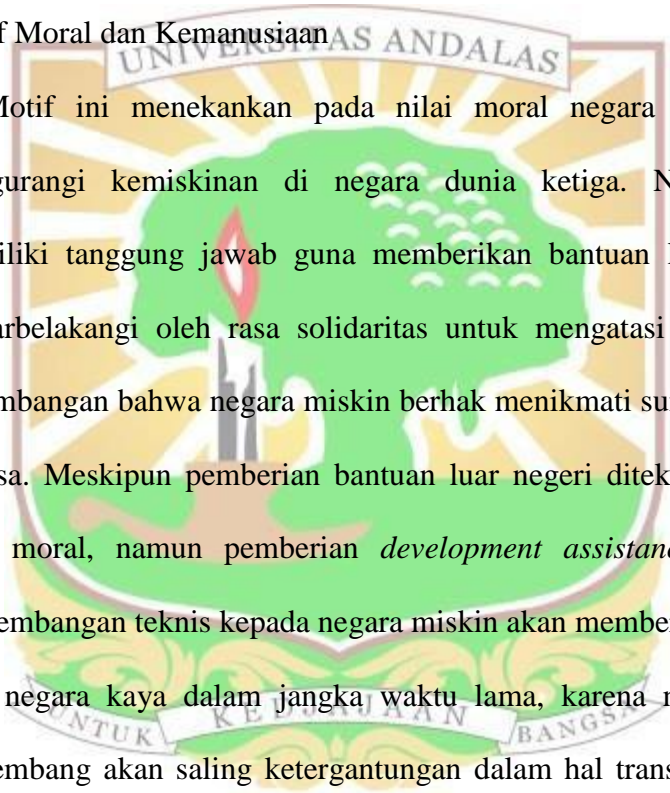
²³ John Degnbol-Martinussen dan Poul Engberg-Pedersen, *Aid: Understanding International Development Cooperation* (London: Zed Books, 2003): 1-2, diakses Juni 28, 2022, https://www.google.co.id/books/edition/Aid/2w0RM2P_egkC?hl.

²⁴ Louis A. Picard, Robert Groelsema, dan Terry F. Buss, *Foreign Aid and Foreign Policy, Foreign Aid and Foreign Policy: Lessons for the Next Half Century, 1st Edition*. (New York: M.E Sharpe, 2008):12.

melatarbelakangi jenis dan juga negara tujuan diberikannya bantuan luar negeri tersebut.

John Degenbol-Martinussen dan Poul Engberg-Pedersen menyatakan bahwa terdapat empat motif yang dimiliki negara donor dalam memberikan bantuan luar negerinya yaitu: motif moral dan kemanusiaan, motif politik, motif ekonomi, dan motif lingkungan.²⁵

1. Motif Moral dan Kemanusiaan



Motif ini menekankan pada nilai moral negara pendonor untuk mengurangi kemiskinan di negara dunia ketiga. Negara pendonor memiliki tanggung jawab guna memberikan bantuan luar negeri yang dilatarbelakangi oleh rasa solidaritas untuk mengatasi kemiskinan dan pertimbangan bahwa negara miskin berhak menikmati sumber daya secara leluasa. Meskipun pemberian bantuan luar negeri ditekankan atas dasar nilai moral, namun pemberian *development assistance* atau bantuan pengembangan teknis kepada negara miskin akan memberikan keuntungan bagi negara kaya dalam jangka waktu lama, karena negara maju dan berkembang akan saling ketergantungan dalam hal transfer sumber daya alam sehingga kerja sama ekonomi menjadi hal yang tidak terhindarkan.²⁶

Motif ini dilihat sebagai motif utama yang mendasari pemberian bantuan luar negeri multilateral, karena bantuan luar negeri disalurkan melalui

²⁵ John Degenbol-Martinussen dan Poul Engberg-Pedersen, *Aid: Understanding International Development Cooperation*.

²⁶ John Degenbol-Martinussen dan Poul Engberg-Pedersen, *Aid: Understanding International Development Cooperation*, 10.

kerangka kerja sama ekonomi yang bersifat murni dan berakar pada motif moral dan kemanusiaan.

2. Motif Politik

Motif politik merupakan instrumen yang jarang dijadikan alasan utama dalam pemberian bantuan luar negeri, namun beberapa negara industri dan negara kaya tetap mendistribusikan bantuan luar negerinya untuk mencapai kepentingan negaranya melalui *peace and security*, *diplomatic relation* dan *diplomatic power*.²⁷ Biasanya bantuan militer akan digunakan oleh negara donor sebagai sarana untuk membentuk aliansi baik secara militer maupun secara politik. Namun bantuan melalui bidang militer ini jarang ditemui, karena negara donor lebih banyak memberikan bantuan dalam bidang pembangunan. Pemberian bantuan yang dilakukan oleh negara donor akan disesuaikan kembali dengan *national security* dari negara donor melalui *peace and security* untuk menjaga keamanan dan perdamaian di sekitar daerah teritorinya.²⁸ Selain itu motif politik dibalik pemberian bantuan luar negeri juga memiliki kekuatan diplomatik atau *diplomatic power* bagi negara donor yang tergabung di dalam organisasi internasional, dan dengan adanya *diplomatic power*, maka negara donor secara tidak langsung akan memiliki hubungan diplomatik atau *diplomatic relations*.

²⁷ Daniel Ehrendfeld, "Foreign Aid Effectiveness Political Rights and Bilateral Distribution," *Journal of Humanitarian Assistance* (2004).

²⁸ John Degenbol-Martinussen dan Poul Engberg-Pedersen, *Aid: Understanding International Development Cooperation*:12.

3. Motif Ekonomi

Menurut John Degenbol-Martinussen dan Poul Engberg-Pedersen pemberian bantuan luar negeri dari negara donor ke negara penerima merupakan salah satu bentuk motif ekonomi yang dilakukan untuk menjaga hak akses atau *maintain privilege access* terhadap pasar dan sumber daya yang dimiliki oleh negara penerima. Motif ini menentukan bagaimana negara donor 'memilih' negara penerima bantuannya serta bagaimana metode pemberian bantuan luar negeri akan dilaksanakan. Negara bekas jajahan biasanya mendapat konsentrasi bantuan luar negeri yang lebih besar dari koloninya, dengan tujuan untuk menjaga hak akses terhadap sumber daya dan pasar di wilayah negara bekas jajahan.²⁹

Selain itu, motif ekonomi juga berbicara mengenai perluasan akses pasar atau *trade relations* di negara tujuan. Hal ini merujuk pada kegiatan ekspor dan impor. Saat negara donor memberikan bantuannya, mereka mengharapkan adanya peningkatan dalam hal ekspor dan impor, melalui bantuannya tersebut negara donor dapat menciptakan peluang bagi negaranya untuk menambah pendapatan dari hasil penjualan barang-barangnya di negara penerima. Melalui hubungan dagang tersebut negara penerima menjadi ladang kepentingan ekonomi bagi negara donor. Sehingga dengan adanya hal seperti ini negara donor dilihat memiliki motif ekonomi terhadap negara penerima dalam bentuk *investment*.

²⁹ John Degenbol-Martinussen dan Poul Engberg-Pedersen, *Aid: Understanding International Development Cooperation*.:13.

4. Motif Lingkungan

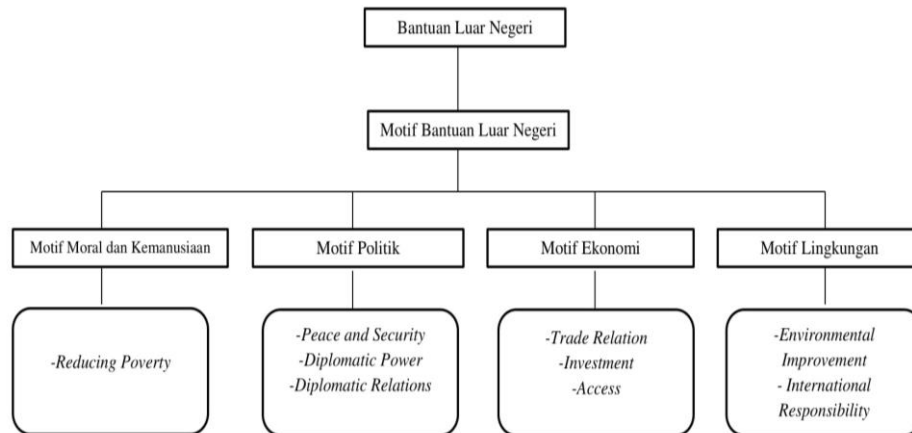
Bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara donor juga memiliki motif lingkungan yang dilatar belakangi oleh kondisi kerusakan lingkungan di dunia sejak tahun 1980-an, sehingga setiap negara memiliki ketergantungan dan kepentingan global dalam melindungi lingkungan.³⁰

Adapun langkah untuk memperbaiki lingkungan yang dapat dilakukan oleh negara donor terhadap negara berkembang dapat dilihat melalui dua cara yaitu *environmental improvement* dan *international responsibility*. *Environmental improvement* dapat dilihat dengan adanya upaya dari negara donor untuk membantu mengatasi permasalahan lingkungan dan mencegah dampak lintas batas dari kerusakan lingkungan, sementara itu *international responsibility* terlihat dari tindakan negara donor terhadap permasalahan lingkungan yang sedang terjadi di negara penerima sehingga akan dinilai oleh dunia internasional memiliki tanggung jawab dalam memperbaiki lingkungan.³¹

Keempat indikator dari kerangka konsep motif bantuan luar negeri menurut John Degenbol-Martinussen dan Poul Engberg-Pedersen tersebut akan membantu peneliti dalam menganalisis motif dari bantuan Australia dalam isu perubahan iklim di Pasifik Selatan pada masa pemerintahan Scott Morrison, yang mana pada akhirnya menjadi motif bagi Australia dalam menjalankan bantuan luar negerinya.

³⁰ John Degenbol-Martinussen dan Poul Engberg-Pedersen, *Aid: Understanding International Development Cooperation*:15.

³¹ John Degenbol-Martinussen dan Poul Engberg-Pedersen, *Aid: Understanding International Development Cooperation*:16.



Gambar 1.1 Bagan Konsep Motif Bantuan Luar Negeri

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan pendapat Martinussen dan Pedersen³²

Berdasarkan gambar 1.1 tersebut dapat dilihat indikator-indikator yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis motif bantuan iklim Australia berdasarkan konsep motif bantuan luar negeri.

1.8 Metode Penelitian

Metodologi adalah prosedur yang digunakan dalam mendeskripsikan, menjelaskan dan meramalkan fenomena yang akan diteliti.³³ Metode penelitian pada umumnya diartikan sebagai kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data sehingga diperoleh pemahaman atas suatu isu, gejala, atau topik tertentu. Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis berdasarkan data,

³² John Degenbol-Martinussen dan Poul Engberg-Pedersen, *Aid: Understanding International Development Cooperation*.

³³ Mochtar Mas'oeed, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin Dan Metodologi* (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan sosial, 1990): 3.

dilakukan secara kritis, objektif dan ilmiah guna mendapatkan pemahaman yang lebih dalam terhadap suatu masalah.³⁴

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan deskriptif analisis. Penelitian kualitatif adalah kegiatan memposisikan pengamat dengan realitas dengan memahami fenomena yang ada, dapat terdiri dari serangkaian representasi, termasuk catatan lapangan, wawancara, konservasi, foto, rekaman dan memo.³⁵ Adapun Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan status objek penelitian pada saat penelitian diadakan, atau dengan kata lain, menginformasikan keadaan sebagaimana adanya.³⁶ Alasan peneliti memilih jenis penelitian deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan bagaimana motif Australia dalam bantuan iklimnya ke kawasan Pasifik Selatan pada masa pemerintahan Scott Morrison.

1.8.2 Batasan Penelitian

Peneliti memberikan batasan waktu yang digunakan untuk melihat motif bantuan Australia terkait isu perubahan iklim di kawasan Pasifik Selatan dari tahun 2018 hingga Mei tahun 2022. Adapun alasan dipilihnya batasan penelitian pada tahun tersebut, karena tahun 2018 merupakan awal masa jabatan Scott Morrison

³⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 2008), <https://id.scribd.com/document/526191239/Metode-Penelitian-Kepustakaan>.

³⁵ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design : Choosing Among Five Approach Second Edition*, Edisi Ke-4 (California: Sage Publication, 2007), diakses April 9, 2021 <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-inquiry-and-research-design/book246896>.

³⁶ Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Padang: Sukabina Press, 2016).

sebagai Perdana Menteri Australia, dan tahun 2022 merupakan akhir dari masa jabatan Morrison sebagai perdana menteri. Pada rentang waktu tersebut peneliti akan melihat apa saja program bantuan adaptasi dan mitigasi iklim Australia ke kawasan Pasifik Selatan lalu menganalisis motif dibalik bantuan luar negeri tersebut.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis atau variabel dependen merupakan objek yang aktivitasnya akan diteliti dan unit eksplanasi atau variabel independen merupakan objek yang mempengaruhi aktivitas unit analisis.³⁷ Unit analisis dalam penelitian ini adalah motif bantuan luar negeri Australia ke Pasifik Selatan. Bantuan luar negeri Australia menjadi unit analisis dikarenakan penulis akan mengkaji motif dibalik bantuan iklim Australia di bawah pemerintahan Scott Morrison. Sedangkan unit eksplanasinya yaitu bantuan iklim Australia ke Pasifik Selatan, khususnya pada masa pemerintahan Scott Morrison. Sementara itu, level analisis merupakan acuan posisi dari unit yang akan diteliti. Menurut Mochtar Mas'ood, level analisis dibagi menjadi lima yaitu: individu, kelompok, negara-bangsa, pengelompokan negara-negara dan sistem internasional.³⁸ Untuk level analisis dari penelitian ini adalah pengelompokan negara-negara, hal ini dikarenakan adanya interaksi aktor dengan aktor lainnya yang melewati batas suatu negara, yaitu Australia dan negara-negara di Kawasan Pasifik Selatan. Hal ini dilihat dari tindakan dan interaksi negara tersebut, yang mana Australia memberikan bantuan iklim kepada negara-negara di Kawasan Pasifik Selatan, sehingga menimbulkan tanda tanya mengenai motif dibalik sikap yang diambil oleh Australia tersebut.

³⁷ Laura Roselle and Sharon Spray, *Research Writing in International Relations* (London: Longman Pearson, 2012): 11-12.

³⁸ Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin Dan Metodologi*: 46-48.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal penting dalam penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan dan informasi yang dapat dipercaya.³⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan metode penelitian berbasis data sekunder. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan literatur kepustakaan yang mempunyai hubungan logis dengan permasalahan yang diteliti dan mengambil data dari instansi yang terkait dengan penelitian. Pengumpulan data utama dari penelitian ini bersumber dari artikel jurnal yang memiliki kata kunci (*keywords*) seperti Australia, Pasifik Selatan, perubahan iklim, motif, Scott Morrison dan bantuan luar negeri.

Peneliti juga menggunakan sumber dari website resmi Pemerintah Australia yaitu *Department of Foreign Affairs and Trade*, dari laman website tersebut peneliti memperoleh laporan resmi mengenai program bantuan Australia, kebijakan serta data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Laporan resmi yang sudah peneliti kumpulkan diantaranya laporan dari Pemerintah Australia dengan judul “*Tackling Climate Change Through Australia’s Development Assistance Program 2020–2025*”, kemudian framework “*Australia Pacific Climate Change Action Program*”, selanjutnya laporan organisasi internasional seperti penelitian dari Greenpeace Australia Pacific dengan judul “*How Australia’s Climate Policies Isolate It from the Pacific and the World*”. Data yang peneliti kumpulkan juga bersumber dari buku, pidato, media online, berita dan sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik yang dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan data terkait penelitian ini.

³⁹ Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* :42.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengurutkan data secara sistematis yang diperoleh dari pengamatan selama penelitian dengan cara mengorganisasikan data pada kategori-kategori, menjabarkan ke dalam unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴⁰ Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis data yang diperkenalkan oleh Miles, Huberman dan Saldana, yaitu: kondensasi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.⁴¹

1. Kondensasi data

Kondensasi data merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mentransformasikan data dari dokumen, catatan lapangan dan data empiris lainnya. Data tersebut dapat diubah dengan meringkasnya menggunakan kalimat sendiri. Berdasarkan data yang dimiliki, peneliti akan memilih data yang penting dan akan membuang data yang dianggap tidak penting.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan sebuah pengorganisasian, kumpulan informasi yang kemudian diolah dan disusun dalam bentuk tulisan yang lebih runut. Penyajian data dilakukan agar peneliti lebih mudah memahami permasalahan yang berkaitan dengan penelitian.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, CV, 2013).

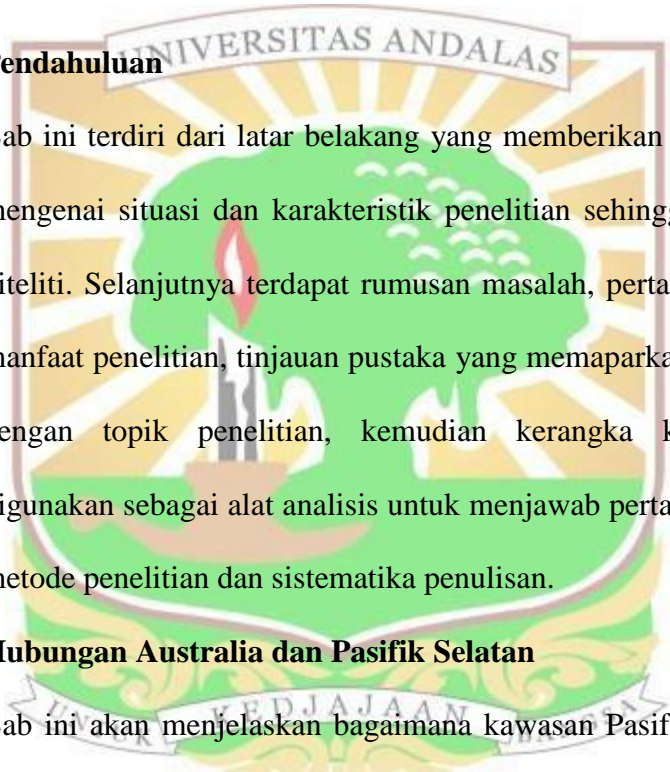
⁴¹ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebooks, 3rd Edition* (Sage Publication, 2014):3-16.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahapan ini merupakan proses akhir dalam analisis data yang mana mencakup kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh. Kemudian data tersebut akan memperkuat tulisan dan membantu dalam menjawab pertanyaan penelitian.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan



Bab ini terdiri dari latar belakang yang memberikan gambaran umum mengenai situasi dan karakteristik penelitian sehingga penting untuk diteliti. Selanjutnya terdapat rumusan masalah, pertanyaan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka yang memaparkan literatur terkait dengan topik penelitian, kemudian kerangka konseptual yang digunakan sebagai alat analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Hubungan Australia dan Pasifik Selatan

Bab ini akan menjelaskan bagaimana kawasan Pasifik Selatan secara geografis dan historis, hingga penjelasan mengenai sejarah hubungan Australia dan negara-negara di Pasifik Selatan, hubungan tersebut akan dijabarkan dari bidang politik, ekonomi dan sosial. Selanjutnya pada bab ini juga akan dijelaskan hubungan Australia dan Pasifik Selatan khususnya pada masa pemerintahan Scott Morrison.

BAB III Bantuan Australia Terkait Isu Perubahan Iklim di Pasifik Selatan Pada Masa Pemerintahan Scott Morrison

Bab ini akan menjelaskan sejarah bantuan luar negeri Australia, serta kehadiran *Australian Aid* di Kawasan Pasifik Selatan. Selain itu, peneliti juga akan menjabarkan kerja sama serta bantuan program adaptasi dan mitigasi iklim Australia pada masa pemerintahan Scott Morrison yang disalurkan ke kawasan Pasifik Selatan.

BAB IV Analisis Motif Bantuan Iklim Australia ke Pasifik Selatan Pada Masa Pemerintahan Scott Morrison

Bab ini merupakan bagian dari temuan, yang memaparkan hasil analisis dari penelitian mengenai motif bantuan iklim Australia di Kawasan Pasifik Selatan pada masa pemerintahan Scott Morrison. Dalam menganalisis motif tersebut peneliti menggunakan konsep motif bantuan luar negeri oleh John Degenbol-Martinussen dan Poul Engberg-Pedersen yang telah dijelaskan pada BAB I bagian kerangka konseptual.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Penulis akan menyimpulkan penelitian terkait bantuan luar negeri Australia dalam isu perubahan iklim di Pasifik Selatan pada masa pemerintahan Scott Morrison, dan juga menyertakan saran yang dibuat berdasarkan hasil temuan dengan tujuan untuk mengembangkan hasil penelitian.